

IPTEKS *DIGITALIZATION TREASURY* PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI UTARA

Moudy Olyvia Uno¹, Stanly W. Alexander²

^{1,2}Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Jln.Kampus Bahu, Manado, 95115, Indonesia

Email : moudyolyviauno@gmail.com

ABSTRACT

Management of state finances is certainly inseparable from the development of the era. The more advanced technology is, the easier it should be for management of state finances. Therefore, it is necessary to implement a system that has been digitized so the benefits of this rapid technological development can be felt by all parties. This is what underlies changes in the finance ministry of the Republic of Indonesian especially in the Directorate General of Treasury. The state treasury system and state budget (STSSB) and agency-level financial application system (AFAS) that support file input and adjustment processes in the Directorate General of Treasury and work units are part of digitalization that has been carried out at the Director General of Treasury., so that all facilities offered by technology in this era can lead to superior treasury manager at the world level. Development and improvement not only stop at the system, but also on the human resources that run the system. The quality of human resources should be improved.

Keywords : Digitalization, Information, Human Resources, AFAS, and STSSB.

1. PENDAHULUAN

Siapa yang hingga saat ini tidak menggunakan teknologi untuk kehidupan sehari-harinya. Di era digital ini segala sesuatu yang telah didesain terkomputerisasi hal ini dinilai mampu membantu segala aktivitas yang kita jalankan sehari-hari. Dalam ranah yang lebih luas pun dalam hal yang lebih spesifik yakni bidang keuangan Kemenkeu (Kementerian Keuangan) mulai melakukan digitalisasi terhadap kegiatan-kegiatan yang pada awalnya masih dilakukan dengan cara konvensional. Pembaharuan ini tidak hanya pada setiap tugas yang diemban oleh kelembagaan keuangan secara umum itu sendiri namun merambah kepada parikel-partikel yang paling berpengaruh dari suatu kelembagaan yakni individu yang ada di dalamnya dan menjalankan setiap tugas pokok dan fungsi dari kelembagaan itu sendiri. Oleh karena itu, peningkatan kualitas dituntut harus ada dalam setiap individu yang telah lebih dulu bekerja dan menjalankan kegiatan di dalam kelembagaan keuangan ini, oleh karena itu dibutuhkan generasi baru yang berkompeten dengan segala kualifikasi yang baik dan ditunjukkan dari kinerjanya untuk menghadapi era teknologi yang semakin bertumbuh pesat ini. Dengan dilakukannya regenerasi dengan individu yang berintegritas tinggi dan mampu bersaing secara global maka tujuan dari DJPb itu sendiri yakni menjadi pengelola perbendaharaan yang unggul di tingkat dunia dapat tercapai.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian *Digitalization Treasury*. *Digitalization treasury* terdiri dari dua suku kata yakni *Digitalization* yang dalam Bahasa Indonesia diterjemahkan dengan digitalisasi, dikutip dari Wikipedia yakni suatu proses yang mengubah informasi dari format analog merupakan format digital sehingga mudah untuk disimpan, diproduksi, didistribusikan, dan dikelola. Sementara *Treasury* dalam Bahasa Indonesia disebut Perbendaharaan yang diartikan sebagai tempat menyimpan harta benda atau dalam hal ini merupakan suatu lembaga yang mengelola

keuangan negara. Ditarik dari penjelasan di atas, maka Digitalization Treasury merupakan suatu proses digitalisasi yang diterapkan dan dijalankan oleh suatu lembaga yang mengelola keuangan negara atau di Republik Indonesia kita kenal dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb).

Pengenalan DJPb secara Umum. Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 36/KMK.01/2014 tentang Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan pada Tahun 2014-2025 serta sesuai dengan KDJ Nomor KEP-666/PB/2017 berikut penjabaran Visi DJPb yaitu Menjadi Pengelola Perbendaharaan Negara yang Unggul pada Tingkat Dunia atau *To Be A World Class State Treasury Manager*. Untuk mencapai tujuan tersebut tentu saja diperlukan langkah dan strategi untuk mendukung tercapainya tujuan tersebut. Dijabarkan misi dari DJPb adalah sebagai berikut:

1. Mengejawantahkan tata kelola kas dan investasi yang pruden, efisien, dan optimal;
2. Mendukung kinerja pelaksanaan anggaran yang tepat waktu, efektif, dan akuntabel;
3. Mengejawantahkan akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan tepat waktu;
4. Melebar kapasitas pendukung sistem perbendaharaan yang andal, profesional, dan modern.

Fungsi Digitalization Treasury. Fungsi yang dijalankan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan sendiri tidak mengalami perubahan yang harus disahkan secara hukum (UUD), hanya saja dalam menjalankan Tupoksi (tugas pokok dan fungsi) lembaga itu sendiri telah didukung secara menyeluruh oleh perangkat digital yang dijalankan oleh Sumber Daya Manusia dalam hal ini pegawai di Direktorat Jenderal Perbendaharaan terkhusus Kantor Wilayah DJPb Provinsi Sulawesi Utara. Digitalisasi yang diterapkan di KanWil DJPb Prov. Sulawesi Utara ini berfungsi untuk mempermudah segala bentuk kegiatan yang ada di dalam kantor sehingga tercipta keefektifan dan keefisienan di dalam kantor. Berdasarkan PMK Nomor 184/PMK.01 Tahun 2010, tugas pokok dari DJPb sendiri ialah melakukan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas dan investasi, pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, dan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu DJPb juga menjalankan fungsinya yakni merumuskan dan menjalankan regulasi yang disusun bersamaan dengan norma, standar, dan prosedur pengelolaan keuangan negara, melakukan bimbingan teknis dan supervisi yang meliputi penyelenggaraan dan penggunaan anggaran, serta melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala dalam prosedur pengelolaan keuangan negara yang dimulai dari perencanaan penggunaan anggaran hingga pada pelaporan dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Digitalization Treasury pada DJPb Provinsi Sulawesi Utara. Perkembangan teknologi di era post-modern ini menuntut kita yang hidup pada masa kini untuk senantiasa menjadi “melek” teknologi, mengingat saat ini seluruh aktivitas manusia didukung oleh perangkat digital. Hal inilah yang mendasari pelaksanaan dan penerapan digitalisasi di Direktorat Jenderal Perbendaharaan pada umumnya. Terkhusus KanWil DJPb Prov. Sulut dibutuhkan pengaplikasian digital untuk menghubungkan 4 KPPN yang ada di Provinsi Sulut. Hal ini dilakukan dengan cara melakukan pengoperasian pada aplikasi SPAN dan SAKTI. Serta pemanfaatan e-office khusus untuk pegawai di lingkup KanWil DJPb Prov. Sulut.

3. METODE DAN TEKNIK PENERAPAN IPTEKS

3.1. Metode Penerapan Ipteks

Digitalization Treasury diterapkan dengan memanfaatkan teknologi yang sudah ada, didukung dengan pembaharuan pada beberapa bagian termasuk pada perangkat lunak (*software*) dan perangkat keras (*hardware*). *Digitalization Treasury* sendiri diterapkan di KanWil DJPb Provinsi Sulut, penerapannya dimulai dengan pengarsipan surat menyurat yang

diterima dengan cara melakukan akses ke laman web e-Office DJPb dan melakukan log-in dengan menggunakan NIP Pegawai. Melangkah pada hal yang lebih spesifik, yakni rekonsiliasi yang dilakukan oleh seluruh satuan kerja dapat dilakukan darimana saja. Cukup dengan mengakses langsung website resmi DJPb www.djpb.kemenkeu.go.id. Selain itu DJPb sendiri memiliki suatu aplikasi yang disebut dengan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi atau disingkat dengan SAKTI yang berfungsi untuk menjembatani komunikasi yang terintegrasi antara KPPN.

3.2. Teknik Penerapan Ipteks

Hal ini sejalan dengan Sistem Informasi Akuntansi yang berlaku saat ini, dimana hampir keseluruhan dari kegiatan yang ada pada KanWil DJPb Sulut telah didukung penuh oleh perangkat teknologi yang memadai. Tidak hanya pada perangkatnya saja, tapi juga pada Sumber Daya Manusia yang mendukung penggunaan IPTEK, atau dengan kata lain individu yang menggunakan dan menjalankan aplikasi dan sistem ini sebagai penunjang atas aplikasi dan sistem yang telah dibangun yakni SAKTI dan SPAN.

4. PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Objek Penerapan Ipteks

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi SULUT adalah salah satu dari sekian Unit Eselon II di Kementerian Keuangan. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan no. 303/KMK.01/2004, KanWil DJPb Prov. Sulut merupakan hasil pemekaran dari KanWil XI Direktorat Jenderal Anggaran Ambon. KanWil DJPB sendiri merupakan salah satu lembaga yang bertanggung jawab langsung pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau dalam hal ini kinerja yang ada di dalamnya tidak diintervensi oleh pemerintah daerah setempat. Ranah kerja Kantor Wilayah sendiri meliputi seluruh lapisan pada suatu provinsi termasuk kabupaten dan kota. Kantor Wilayah DJPb sendiri terbagi di seluruh Provinsi di Republik Indonesia. Sampai saat ini terdapat 34 Kantor Wilayah, dengan KanWil terbaru terletak di Provinsi Termuda yakni Kalimantan Utara. Struktur organisasinya sudah tentu dinahkodai oleh seorang Kepala Kantor Wilayah. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, KanWil DJPb Sulut membawahi dan melakukan pembinaan secara langsung pada 4 (empat) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), yaitu: KPPN Bitung, KPPN Manado, KPPN Tahuna, dan KPPN Kotamobagu.

4.2. Pembahasan

Digitalisasi di era milenial seperti sekarang ini telah menjadi kebutuhan yang perlu dipenuhi, perkembangan teknologi telah menjadi bagian penting diseluruh elemen kehidupan manusia. Hingga penggunaannya pada pengelolaan keuangan negara, pemanfaatan teknologi yang baik akan tentu saja menghasilkan kinerja yang baik. Namun perlu diperhatikan bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) adalah salah satu faktor produksi yang penting bagi organisasi. Suatu sistem yang didigitalisasi dibangun tidak dapat berjalan secara optimal tanpa adanya dukungan dari SDM yang kompeten, karena itulah SDM yang berkualitas menjadi faktor penting untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam mewujudkan digitalisasi di suatu lembaga maka dibutuhkan pemerataan terhadap penempatan setiap individu yang berkualifikasi demi menyokong kinerja dari setiap unit organisasi. Tercatat pada akhir tahun 2017 ada sejumlah 141 yang menjalankan roda kegiatan pengelolaan perbendaharaan negara dan sistem yang terintegritas di ranah KanWil DJPb Provinsi Sulut yang keseluruhannya terbagi di 4 KPPN dan 1 Kantor Wilayah. Berdasarkan Surat Sekretaris Ditjen Perbendaharaan Nomor S-8748/PB.1/2015, tenaga kerja yang berkompeten bisa dinilai dari kualifikasi pendidikan yang terdapat pada individu tersebut, dibutuhkan SDM yang mumpuni agar digitalisasi yang dilakukan di KanWil DJPb bisa dijalankan dengan baik. Hal ini akan berdampak pula terhadap kinerja KanWil DJPb sendiri, yakni tujuan dari DJPb akan semakin dekat dalam perealisasiannya. Dibutuhkan penjaringan pegawai yang sudah tentu harus lebih

selektif dengan ranah yang lebih luas karena kemajuan perbendaharaan ditunjang oleh SDM yang berkualifikasi pula. Kualitas SDM terlihat meningkat cukup signifikan semenjak tahun 2014 hingga kini. Tak hanya itu, dorongan dari sejumlah faktor internal maupun eksternal sangat berpengaruh agar DJPb bisa menjadi “*A World Class Treasury Manager*” sesuai dengan visinya bisa terwujud. Digitalisasi yang dilakukan di KanWil DJPb Provinsi Sulut sudah tentu berpengaruh terhadap kinerja keseluruhan dari DJPb secara luas, hal ini bisa dilihat dari pencapaian atas implementasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan atau lebih dikenal dengan FMIS (*Financial Management Information Sistem*) yang tergambar dari aplikasi yang telah dikembangkan yakni Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN). Dewasa ini, SPAN telah menjadi salah satu komponen utama digitalisasi yang tengah dilakukan oleh DJPb dalam pelayanan yang diawali dengan kegiatan yang menjadi akar pengelolaan yakni penyusunan anggaran, realisasi anggaran dan mengerucut hingga bagian pucuk yaitu hingga penyusunan laporan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku oleh keseluruhan DJPb termasuk KanWil DJPb Provinsi Sulut. Perkembangan SPAN ini mendukung progres menuju Sistem Informasi Manajemen Keuangan yang Terintegrasi atau *Integrated Financial Management Information System* (IFMIS). Sistem informasi keuangan publik terintegrasi menjadi partikel utama dari restorasi keuangan di negara-negara berkembang, termasuk pula di Indonesia (Brown, 2008). Tidak hanya SPAN namun ada pula SAKTI yang diciptakan untuk mendukung kinerja SPAN. Menelaah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.05/2015, SAKTI sendiri merupakan gabungan dari beberapa aplikasi yang ada di satuan kerja dan menghubungkan atau memfasilitasi komunikasi antara satuan kerja dan KPPN yang bertanggung jawab dalam pelayanan perbendaharaan negara.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Penggunaan teknologi yang baik di era digital seperti ini berperan sangat penting dalam pencapaian *digitalization treasury*, namun perlu diingat bahwa hal ini didukung pula oleh peningkatan kualitas sumber daya manusianya, mengingat SDM yang baik dapat menciptakan teknologi informasi yang modern yaitu dan dapat digunakan seperti Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN). Dengan meningkatnya kualitas sumber daya manusia tentu digitalisasi di lingkup DJPb dapat diterapkan sehingga tujuan untuk menjadi pengelola perbendaharaan yang unggul ditingkat dunia dapat tercapai.

5.2. Saran

Sebaik-baiknya suatu sistem yang telah didigitalisasi tetap diperlukan pengelolaan dan pemeliharaan yang terjaga, tidak hanya itu digitalisasi terhadap suatu sistem juga perlu diperbaharui secara berkala mengingat pada masa kini perubahan dan perkembangan terjadi dalam kurun waktu yang singkat. Kualitas sumber daya manusia pun perlu ditingkatkan, mengingat sebaik-baiknya sistem digital ia tetap memerlukan SDM yang mumpuni untuk menjalankan roda digital tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsip Bagian Umum *Organisasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN), tahun 2017-2018.*
- Arsip Bagian Umum *Profil dan Isu Strategis DJPb dalam Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN), tahun 2016-2018.*
- Arsip PAPP *Kebijakan Pelaksanaan dan Capaian Organisasi-SGM dalam Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), tahun 2016-2018.*

- Brown E. R. 2008. *Integrated Financial Management Information Systems: A Practical Guide*. The Louis Berger Group, Inc., and Development Alternatives, Inc., United States Agency for International Development. 2008
- Kementerian Keuangan. 2017. *Buku Profil Kantor Wilayah Sulawesi Utara (SK .Kepdirjen/KMK)*. Jakarta.
- Keputusan Menteri Keuangan no. 303/KMK.01/2004 tentang *Tugas Pokok dan Fungsi Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan KPPN*
- Keputusan Menteri Keuangan. Nomor 36/KMK.01/2014 tentang *Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan Tahun 2014-2025*
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang *Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan*. Jakarta
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.05/2015 tentang *Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI)*
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.01/2016 tentang *Manajemen Risiko Di Lingkungan Kementerian Keuangan*.
- Keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor KEP-287/PB/2015 tentang *Standar Operasional Prosedur pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara*.
- Wikipedia. 2007. *Digitalisasi Informasi*.
(https://id.m.wikipedia.org/wiki/Digitalisasi_Informasi. Diakses 4 Desember 2018)